

**1st WEEK****Januari 2018**❖ **MAKRO**

- Hasil notulensi rapat The Federal Open Market Committee (FOMC) Desember yang dirilis tadi malam menunjukkan, petinggi The Federal Reserve memprediksi pemangkasan pajak korporat dan individu akan mengerek anggaran belanja dan bisnis. Meski demikian, bank sentral AS ini masih tidak yakin dampak yang diakibatkan dari undang-undang perpajakan yang baru. Anggota FOMC menaikkan ekspektasi pertumbuhan PDB 2018 dari 2,1% menjadi 2,5%. "Mayoritas partisipan mengindikasikan perubahan yang prospektif pada kebijakan pajak federal merupakan faktor yang dapat mendorong mereka meningkatkan proyeksi pertumbuhan PDB riil dalam beberapa tahun ke depan," demikian hasil notulensi tersebut seperti yang dikutip dari CNBC. FOMC merupakan unit pemutus kebijakan moneter The Fed. Komite ini pada rapat tersebut memilih untuk menaikkan suku bunga acuannya menjadi 1,25% hingga 1,5%. Suku bunga ini berhubungan erat dengan suku bunga kredit konsumen.
- Bank Sentral Jepang (BoJ) tegas mempertahankan target inflasi 2 persen untuk tahun ini. Namun, Credit Suisse Group AG memprediksi target itu mustahil untuk dicapai pada 2018. Menurut Hiromichi Shirakawa, Kepala ekonom Jepang di Credit Suisse, ekonomi Jepang memang tengah menikmati momentum pemulihan siklus yang diuntungkan dari lonjakan permintaan global. Namun, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan perubahan struktural. "Sulit bagi kami untuk mengatakan target inflasi 2 persen BoJ bisa dicapai secara berkelanjutan," ungkap Shirakawa dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television. "Kami belum melihat adanya perubahan struktural dalam pola pikir rumah tangga dan perusahaan di Jepang," sambungnya. Dia belum melihat ada peningkatan, baik dalam produktivitas tenaga kerja maupun konsumen Jepang.

- Ulasan:

Mayoritas diskusi yang terefleksi dari hasil notulensi menunjukkan besarnya pengamatan terhadap ekonomi. Termasuk ketidakyakinan anggota FOMC tersebut terhadap seberapa banyak dorongan dalam perekonomian yang berasal dari kebijakan pajak.

❖ **MIKRO**

- Akhir April menjadi tenggat waktu bagi lembaga jasa keuangan domestik maupun luar negeri untuk memberikan laporan pertama data keuangan nasabah per 31 Desember kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan pertama juga akan diterima Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Agustus 2018 yang akan diteruskan oleh OJK kepada DJP pada akhir bulan yang sama. Data tersebut kemudian yang akan dipertukarkan dengan 101 negara anggota Global Forum yang bersepakat menerapkan Automatic Exchange of Information (AEOI) mulai September mendatang. Data keuangan yang diserahkan terdiri dari data identitas nasabah, data keuangan nasabah, data identitas lembaga keuangan tempat rekening nasabah, penghasilan yang diperoleh nasabah, dan saldo akhir yang terdapat di dalam rekening nasabah.
- Bank Indonesia (BI) menanggapi mulai munculnya Octoin sebuah mata uang digital baru. Tercatat sudah puluhan ribu orang sudah berinvestasi di Octoin Coin atau OCC. Agusman, Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI bilang Octoin sama halnya dengan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah. "Dari sisi BI sama halnya dengan bitcoin maka octoin juga bukan alat pembayaran yang sah," kata Agusman kepada kontan.co.id, Rabu (2/1). Menurut pengamatan BI, Octoin lebih digunakan untuk alat investasi. Jika mata uang digital digunakan untuk investasi, Agusman bilang sebenarnya masuknya bukan wewenang BI namun OJK. Sebelumnya diberitakan China, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, India, Afrika, Turki, Eropa, Amerika Serikat merupakan negara yang sudah lebih dulu mentransaksikan Octoin

secara internal sejak diluncurkan sejak 2017 lalu. Peminat Octoin di Indonesia juga mulai bermunculan.

Ulasan:

Pemerintah berharap masyarakat tidak perlu takut dengan keterbukaan informasi tersebut. Hal tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam pendapatan negara dari pajak. Namun disamping itu, terdapat pro dan kontra mengenai kebijakan ini, salah satunya adalah akses nasabah jadi terbuka.

#### ❖ **PERBANKAN**

- Bersih-bersih kredit macet masih menjadi agenda bisnis Bank Mandiri Tbk tahun ini. Bank berkode BMRI di bursa saham itu menargetkan bisa menekan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di bawah level 3% pada tahun ini. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, tahun ini ada dua segmen yang bakal menjadi tantangan Bank Mandiri. Yakni, segmen kredit menengah dan kredit konsumen. Sementara berdasarkan sektor kredit, komoditas masih menjadi salah satu yang perlu diawasi. "Tantangannya, ada risiko kredit menengah diiringi dengan slow down di kredit konsumen," kata Kartika, Selasa (2/1). Kendati demikian, bank plat merah ini masih menyalurkan kredit sektor komoditas melalui kredit korporasi. Bank Mandiri menilai, sektor komoditas yang masih berpeluang menerima kredit adalah bisnis kelapa sawit dan batubara. Kartika menambahkan, penurunan daya beli juga masih menghantui kredit konsumsi.
- PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) tercatat berhasil mengumpulkan tabungan Rp 1,22 triliun dari program Laku Pandai. Tabungan Laku Pandai ini dibagi menjadi dua. Dadang Setiabudi, SEVP IT dan Digital Banking BNI bilang, yang pertama adalah berasal dari BNI Pandai dan kedua adalah dari tabungan reguler BNI. "Sampai November 2017 jumlah DPK BNI Pandai Rp 764 miliar dengan jumlah rekening 4,04 juta," kata Dadang kepada kontan.co.id, Jumat (28/12). Sumber dana murah kedua dari

laku pandai ini dari tabungan reguler yaitu mencapai Rp 556 miliar dengan jumlah rekening 67.616 rekening. Sampai November 2017, jumlah agen BNI46 mencapai 67.616 agen. Untuk meningkatkan penetrasi laku pandai, BNI berusaha memperbanyak jumlah agen.

- Ulasan:

Salah satu upaya dalam menjaga nilai NPL adalah dengan mengurangi risiko dari kredit bermasalah, yaitu dengan mengincar pertumbuhan kredit yang benar-benar akan bisa dicapai. Seperti contoh, jika pada tahun sebelumnya Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit sampai 10%, maka untuk tahun ini diusahakan 11%.

**Disclaimer** : Dokumen ini hanya bertujuan sebagai informasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, namun bukan merupakan jaminan keakuratan atau kelengkapan dan tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Kondisi diatas dapat berubah setiap saat. Dilarang untuk menulis ulang apapun tanpa ijin tertulis dari Bank Jatim.